



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2012 -2013.
Masa Persidangan ke-	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 11 Juni 2013.
Pukul	: 14.10 – 18.20 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: H. Syamsul Bachri S, M.Sc/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, S.H/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Pembahasan RKA K-L dan RKP K-L 2014; 2. Lain-lain
Hadir	: 39 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta Jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/H. Syamsul Bachri S, M.Sc, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. RKP KEMDIKBUD RI TAHUN 2014.

- a. Komisi X DPR RI menilai bahwa Pagu Indikatif RKP 2014 Kemdikbud RI sebesar Rp86,239T mengalami kenaikan sebesar Rp20,589T atau 23,87% dibandingkan dengan pagu RKP 2013 (Rp65,650T).
- b. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melaksanakan Raker lanjutan pada bulan Juli 2013 atau paling lambat sebelum penyampaian Nota Keuangan RAPBN TA 2014 untuk membahas rancangan postur anggaran pendidikan 2014.
- c. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI telah membahas bersama mengenai Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan sepakat rencana alokasi program/kegiatan dan anggaran dalam RAPBN TA 2014 sesuai dengan Renstra Kemdikbud RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya sbb:

- i. Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
 - ii. Program percepatan Pendidikan Menengah Universal;
 - iii. Program penyediaan BOPTN dan sarana dan prasarana PTN;
 - iv. Program peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas LPTK; dan
 - v. Program penyediaan layanan pendidikan afirmasi daerah 3T dan P4B.
- d. Komisi X DPR RI memberikan catatan untuk perbaikan RKP 2014 diantaranya yaitu:
- i. Program BSM perlu dipertahankan disertai dengan adanya peningkatan penyediaan fasilitas, peningkatan satuan biaya BOS untuk SD, SMP, SMA SMK, dan peningkatan satuan biaya BOPTN.
 - ii. Indikator pencapaian pelestarian dan pengembangan kebudayaan tidak semata-mata diukur dengan capaian fisik tetapi seharusnya dengan menggunakan indikator penguatan nilai atau karakter (value).
 - iii. Rencana reformasi birokrasi dengan anggaran sebesar Rp2,33 T masih perlu diperjelas model dan indikatornya.
 - iv. Anggaran BOPTN masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi.
- e. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melaksanakan Raker lanjutan pada bulan Agustus 2013 atau setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN TA 2014 untuk membahas rencana anggaran menurut fungsi, program/kegiatan TA 2014 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

2. REALOKASI SISA ANGGARAN KURIKULUM 2013.

Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat usulan penggunaan sebagian sisa anggaran kurikulum 2013 sebesar Rp323,814 M akan dibahas lebih lanjut dalam RDP dengan Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen dalam waktu dekat yang hasilnya akan dilaporkan dalam Raker sebelum tanggal 17 Juni 2013 termasuk membahas dan memutuskan RAPBN-P TA 2013.

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **18.20 WIB.**

Jakarta, 11 Juni 2013.
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
WAKIL KETUA,


H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.